

## PEGANG TEGUH ATURAN DAN NORMA YANG BERLAKU & TINGKATKAN DISIPLIN DIMULAI DARI KEHIDUPAN KESEHARIAN



Kadiv Propam Polri

Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini pelaksanaan tugas Polri dihadapkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang telah berubah, dimana isu-isu demokratisasi, HAM, supremasi hukum serta masalah lingkungan hidup dengan semua dampak yang muncul ditengah kehidupan masyarakat menuntut Polri untuk bekerja lebih maksimal dengan dilandasi profesionalisme yang tinggi, akuntabel dan transparan. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab Polri dengan dibantu unsur pengamanan lainnya, demikian antara lain amanat Kadiv Propam pada upacara bulanan Tanggal 17 Januari 2008 bertempat di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri Jakarta.

Lebih jauh Kadiv Propam mengatakan oleh sebab itu Polri diharapkan mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan penegakan hukum, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan ditengah kehidupan masyarakat demokrasi ini. Salah satu syarat tegaknya supremasi hukum agar bisa terwujud adalah apabila para penegak hukum/Polisi yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum telah benar-benar bekerja secara profesional, proporsional dan bermoral.

Perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri,

baik pelanggaran disiplin, pelanggaran tata tertib maupun pelanggaran Pidana.

Pada tahun 2007 terjadi pelanggaran sebanyak 18.551 kasus, dengan rincian: pelanggaran disiplin = 5.703 kasus, Pelanggaran tata tertib = 12.072 kasus dan pelanggaran Pidana = 357 kasus. Meskipun semua jenis pelanggaran tersebut sudah ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan kepada pelakunya sudah diberikan hukuman, namun masih saja terjadi komplain/pengaduan masyarakat terhadap kinerja Polri yang masih dirasakan belum sesuai harapan masyarakat tanpa melihat kendala-kendala yang dihadapi Polri.

Penyalahgunaan wewenang, arogansi, tindak kekerasan dan penanganan penyidikan perkara yang tidak tuntas merupakan kasus-kasus yang banyak adukan masyarakat kepada Div Propam Polri. Meskipun tidak semuanya pengaduan itu mengandung kebenaran, namun hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat ikut mengawasi tugas Polri. Disamping itu masih adanya pelanggaran-pelanggaran anggota terkait dengan tata tertib kedinasan seperti mangkir dinas/disersi, seragam dinas yang tidak sesuai aturan, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan lain sebagainya, merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Tugas Div Propam Polri adalah menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. Didasari dengan beberapa aturan seperti peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tehnis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri serta Ketentuan Kode Etik yang telah disepakati bersama. Untuk itu dihimbau kepada seluruh anggota Polri/ PNS Polri agar selalu berpegang pada aturan main yang telah ada dan tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Polri.

Selaku Kadiv Propam Polri menyadari bahwa masih ada anggota-anggota Propam, baik yang bertugas di Div Propam Polri maupun Propam di Polda yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan antara lain; menakut-nakuti anggota Polri/PNS, arogan, sewenang-wenang, memeras dan lain sebagainya. Untuk itu saya sedang melakukan upaya-upaya pembenahan internal Propam, agar dimasa yang akan datang tidak lagi terjadi perbuatan-perbuatan tercela seperti diatas tadi. Kepada saudara-saudara sekalian, apabila ada anggota Propam yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran, agar segera melaporkan kepada saya, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Marilah kita memperbaiki perilaku diri sendiri dan menegakkan peraturan intern yang ada sebagai wujud kemauan kita untuk mereformasi diri menjadi Polisi Sipil yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini sebelum kita merubah perilaku masyarakat. Hal ini mungkin akan sulit dilakukan, namun saya berkeyakinan semua itu dapat terwujud apabila dilaksanakan dengan tekad yang kuat untuk berubah dan dilandasi semangat kebersamaan.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kadiv Propam memberikan penekanan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tingkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas agar selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya.
2. Laksanakan tugas dengan didasari rasa ketulusan dan keiklasan agar mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, serta berguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
3. Tingkatkan disiplin dimulai dari kehidupan keseharian masing-masing pribadi sampai kepada tugas kedinasan demi pemuliaan profesi kepolisian.
4. Pegang teguh aturan dan norma yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan lingkungan serta selalu peka terhadap fenomena sosial yang dapat berkembang menjadi gangguan Kamtibmas dengan selalu memelihara citra kepolisian yang semakin baik.
5. Tingkatkan latihan-latihan dalam bentuk simulasi dan drill-drill agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan sesuai tuntutan dan kemajuan masyarakat.

\*\*\**(nats)*

Disarikan dari amanat Kadiv Propam pada upacara bulanan bertempat di Halaman Bhayangkara Mabes Polri Jakarta.



# CIPTAKAN SELALU NUANSA AKADEMIS DAN PEMBINAAN YANG IDEAL, BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL



Wakapolri membuka Sespim Polri

Sebagai organisasi besar, modern dan kompleks, Polri akan selalu dihadapkan pada tantangan tugas variatif, sebagai konsekuensi atas perkembangan lingkungan strategi yang terjadi baik pada lingkup nasional, regional maupun global. Berbagai perkembangan lingkungan eksternal tersebut, selain membawa dampak positif bagi keberlangsungan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dapat menimbulkan eksekusi negatif berupa kemunculan berbagai gangguan kamtibmas, demikian antara lain amanat Kapolri pada acara pembukaan Sespim Polri Dikreg ke-46 tahun 2008 bertempat di Sespim Polri Bandung.

Lebih jauh Kapolri mengatakan sebagai organisasi yang bertanggung jawab pada pemeliharaan Kamtibmas, kemunculan berbagai gangguan Kamtibmas tersebut, tentunya

merupakan tantangan tugas ke depan yang harus kita hadapi bersama dalam menghadapi tantangan tugas tersebut, Polri telah menetapkan strategi makro yang didukung suatu kebijakan, guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, terkait upaya kegiatan kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri, strategi yang ditetapkan adalah pengedepanan pola pre-emptif melalui Perpolisian Masyarakat, guna mengeliminir berbagai potensi masalah sosial secara dini. Dan pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsisten, proporsional, profesional, berkepastian, dan menyentuh rasa keadilan masyarakat serta mampu memberikan efek jera. Pokok-pokok strategi makro seperti contoh tersebut, pada dasarnya merupakan hasil kajian dan analisa, dalam proses manajemen strategi, yang diawali dengan penilaian internal serta analisis lingkungan, dan dilanjutkan dengan perumusan strategi dan pengimplementasiannya.

Pada tataran implementasi, tentunya diperlukan pimpinan Polri di *level middle manager*, yang mampu mentransformasikan berbagai kebijakan serta strategi makro sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada disekitar lingkungan kerjanya. Untuk itu, kehadiran para Perwira sekalian nantinya di medan

tugas, dituntut mampu menjadi pimpinan unit kerja yang dapat mengaplikasikan berbagai pengetahuan dan kemampuan manajerial, guna menggerakkan organisasi yang dipimpinnya dan menjabarkan serta mengimplementasikan kebijakan Polri yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan tersebut, kepemimpinan Polri yang efektif dibarengi dengan manajemen strategi, akan dapat menghasilkan pencapaian optimal sasaran tugas pokok Polri, yaitu terciptanya Kamtibmas yang kondusif, tertib dan tegaknya hukum serta terlayani, terlindungi, dan terayominya masyarakat, sebagai prakondisi maupun prasyarat akselerasi pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kepemimpinan Polri efektif yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan yang mampu menggagas serta mengawal dinamika suatu perubahan maupun transformasi strategi, baik yang direncanakan (*planned change*) maupun yang tidak direncanakan (*unplanned change*).

Selain itu, kepemimpinan visioner mensyaratkan adanya komitmen kukuh pada visi yang telah ditetapkan, serta adanya kemampuan untuk mempertemukan semua unsur dalam komunitas kemasyarakatan, melalui pola pendekatan yang egaliter dan demokratis. Terkait dengan hal tersebut, ada tiga hal penting yang merupakan ciri kepemimpinan ini, yaitu **memiliki inovasi yang senantiasa berkembang, daya kreativitas yang tinggi, dan keberanian untuk mengambil resiko.** Diharapkan ketiga hal ini dapat diasah oleh para Perwira peserta didik sekalian dengan bimbingan para pengajar dan pengasuh di Sespim Polri. Lebih lanjut, saya ingin juga menyampaikan bahwa dalam dinamika kemasyarakatan yang selalu berkembang, pola kepemimpinan visioner ini diperlukan, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Dalam tata pemerintahan yang baik, selalu terdapat **tiga komponen** utama yang merupakan mitra sejajar, yaitu pemerintah, termasuk Polri didalamnya, selaku **perumus dan**



pelaksana kebijakan publik, sektor usaha selaku penggerak aktivitas perekonomian, dan masyarakat selaku subjek maupun objek dari kegiatan sektor pemerintah maupun dunia usaha.

Dalam hubungan kemitraan dan kesejahteraan tersebut, akan diperlukan kepemimpinan visioner pada organisasi publik, termasuk Polri, yang mampu bermitra dengan berbagai komponen dalam suasana yang *egaliter* serta demokratis, dan mampu menyesuaikan unit kerja yang dipimpinnya dengan perubahan lingkungan strategis melalui *inisiasi* berbagai proses transformasi, khususnya pada lingkungan internalnya.

Sejalan dengan bentuk kepemimpinan visioner sebagaimana yang telah diulas, perubahan maupun transformasi pada suatu organisasi atau *organizational change*, erat kaitannya dengan kemampuan manajerial, strategis dan komitmen yang kuat atas pencapaian strategis dan komitmen yang kuat atas pencapaian visi Polri akan menentukan keberhasilan proses transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan agar para Perwira sekalian juga mengasah *kecerdasan emosional* atau *emotional intelligence* di lembaga Sespim ini, karena pada dasarnya, kepemimpinan visioner yang dimaksudkan adalah bentuk kepemimpinan yang mampu memberikan inspirasi bagi anggotanya untuk mencapai performa Polri sesuai dengan tuntutan masyarakat, melalui pemikiran dan tindakan yang nyata.

Dalam kesempatan ini, perlu disampaikan kembali bahwa kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Sespim adalah, menjadikan para Perwira memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah. Karakter utama yang diharapkan dalam manajer tingkat menengah ini adalah kemampuan untuk mengenali, mencermati serta memahami perkembangan lingkungan strategis, kemampuan mengimplementasikan kebijakan dan strategi makro Polri sesuai

dengan situasi dan kondisi wilayah tugas, serta merumuskan prediksi ancaman Kamtibmas.

Guna pencapaian kompetensi tersebut, Kapolri menyampaikan beberapa hal yang perlu dipedomani dan dilaksanakan oleh Perwira peserta pendidikan Sespim angkatan 46 maupun staf pengajar, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk para Perwira peserta pendidikan, seraplah ilmu yang disampaikan oleh para pengajar, serta asahlah kemampuan manajerial yang bercirikan pola kepemimpinan visioner serta kemampuan berfikir analisis strategis. Tantangan tugas yang semakin kompleks akan sangat memerlukan sosok pimpinan Polri yang mampu menggagas dan mengawali dinamika transformasi organisasi sesuai harapan dan tuntutan masyarakat.
2. Asahlah kecerdasan emosional Perwira sekalian, karena hal ini merupakan kunci dari bentuk kepemimpinan visioner, untuk dapat memberikan inspirasi bagi anggota yang dimaksudkan, meliputi antara lain : kepekaan diri dalam memahami lingkungannya atau *self awareness*, kemampuan melihat diri sendiri atau *self monitoring*, *empathy*, kemampuan WASPADA dalam mengkomunikasikan suatu pandangan dalam yang dapat membangkitkan inspirasi anggota, maupun kemampuan yang merupakan kompetensi emosional lainnya.
3. Jadikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Sespim ini sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan manajerial para Perwira sekalian, karena pada dasarnya keikutsertaan para Perwira dalam mengikuti pendidikan di lembaga Sespim Polri ini, adalah merupakan suatu amanah guna persiapan memikul tugas dan tanggung jawab yang lebih berat sebagai pimpinan pada masa yang akan datang.
4. Perlu diingat bahwa, keikutsertaan para Perwira dalam pendidikan ini, bukan semata sebagai persyaratan administrasi guna menunjang karier, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai wahana menempa diri menjadi *middle manager* Polri yang handal, serta mampu mengawal proses transformasi Polri menuju postur Polri dambaan masyarakat. Untuk itu, ciptakan iklim belajar dan berkompetisi demi prestasi yang sehat, serta hindarkan dari berbagai bentuk **persaingan tidak sehat** yang hanya mengejar pencapaian **ranking semata**.
5. Untuk para staf pengasuh dan pengajar di lingkungan Sespim, dititipkan para Perwira peserta pendidikan ini untuk digembleng dengan baik. Untuk itu, diharapkan agar pola pengajar, pengasuh dan penilaian yang diterapkan dapat mencerminkan bentuk pendidikan yang ideal, selaras dengan komitmen Polri pada pola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
6. Selalu lakukan kajian dan evaluasi atas materi yang diberikan, karena ke depan tantangan tugas yang akan dihadapi para Perwira siswa akan semakin berat. Sesuaikan materi yang diberikan dengan perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional, regional, maupun global.
7. Hindari berbagai bentuk pola pengajaran maupun pengasuhan yang dapat menciptakan peluang dan kesempatan bagi para Perwira siswa untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kredibilitas lembaga Sespim sebagai *center of excellence*, sebagai misal menciptakan suasana berkompetisi secara tidak fair guna mendapatkan nilai tertentu. Ciptakan selalu nuansa akademis dan pembinaan yang ideal, bersih, transparan, dan akuntabel, guna mencapai hasil didik yang diharapkan.\*\*\* (*nats*)

Disarikan dari amanat Kapolri pada upacara pembukaan Sespim Polri Dikreg ke-46 tahun 2008 bertempat di Sespim Polri Bandung.



# PEMBINAAN POTENSI PENGAMANAN SWAKARSA

## PEDOMAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007

Seiring dengan arus globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran Satpam dalam membantu tugas-tugas Kepolisian semakin diperlukan berbagai perubahan dan perkembangan. Sebagai dampak ikutan dari arus globalisasi, selain membawa kemajuan pada berbagai aspek kehidupan, juga telah memunculkan berbagai potensi gangguan Kamtibmas yang dapat berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam hal ini sektor usaha baik industri, niaga maupun jasa pada sektor usaha, Satuan Pengamanan (Satpam) memegang peranan penting sebagai operator dalam sistem pengamanan di lingkungan kerjanya. Peran ini sangat berpengaruh pada realisasi investasi di Indonesia, terkait dengan isu stabilitas keamanan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa peran Satpam adalah sangat strategis, sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang dipercaya dalam menjalankan kewenangan kepolisian terbatas di lingkungan kuasa berdasarkan tempat.

Selain itu, peran Satpam juga terkait erat dengan kemampuan daya saing produksi kita pada pasar global. Hal tersebut disebabkan karena isu *industri security* telah menjadi isu global dan merupakan modal utama dalam meningkatkan kemampuan berkompetisi pada dunia pasar. Dalam kaitan tersebut *industri security* merupakan salah satu komponen dalam *security management* yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap instalasi, sumberdaya, utility, material dan informasi rahasia industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan. Oleh karena itu dengan adanya sistem manajemen

pengamanan yang baik, pada satu sektor usaha maka paling tidak persyaratan utama untuk pengembangan dunia industri, niaga, maupun jasa telah terpenuhi, dimana hal ini tentunya akan dapat mendukung peningkatan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Satpam yang memiliki peran utama dalam membantu Polri, sebagai salah satu operator manajemen pengamanan disuatu lingkungan, harus memiliki kemauan untuk meningkatkan profesionalismenya dalam

meningkatkan profesionalisme ini, tentunya diawali dengan pemahaman yang mendasar, bahwa lembaga Satpam adalah merupakan bentuk pengamanan Swakarsa dengan kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat atau *teritoir gebeid*. Dalam implementasi kewenangan tersebut, lembaga Satpam berada dalam pembinaan Polri sebagai penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian dalam hal ini, Satpam dituntut mampu dan mahir mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah sosial yang



Wakapolri saat memberikan sambutan





Penyerahan piala perlombaan oleh Wakapolri

dapat menjadi sumber gangguan Kamtibmas serta mewujudkan situasi yang kondusif, guna terpeliharanya rasa aman dan tertib bagi masyarakat, khususnya dilingkungan tempat tugasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Polri sebagai penanggung jawab aspek Kamtibmas, tentunya akan terus menjalin kerjasama, yang berlandaskan semangat kemitraan dengan seluruh komponen *Pamswakarsa* termasuk Satpam serta *stakeholder* Kamtibmas lainnya, guna menciptakan kehidupan yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

Dihadapkan pada pentingnya keamanan dan ketertiban, dengan strategisnya peran Satpam disuatu lingkungan tertentu, terutama lingkungan usaha, maka kita dapat melihat secara empirik bahwa kebutuhan akan Satpam terus meningkat dari tahun ketahun. Pada saat ini tercatat jumlah Satpam sebanyak 292.153 orang, yang terserap diberbagai organisasi, perusahaan dan instansi serta lembaga pemerintah, namun demikian angka tersebut belum cukup bila dibandingkan dengan jumlah pengguna yang memerlukan tenaga Satpam.

Selain dari segi jumlah atau kuantitas, kualitas Satpam juga harus kita cermati bersama, karena mempengaruhi kemampuannya dalam pengimplementasian kewenangan kepolisian terbatas.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan Satpam yang profesional dan terakreditasi perlu ada suatu standar kualifikasi yang mampu menjamin kesetaraan kompetensi dan keahlian, yang dipersyaratkan bagi tenaga pengamanan dalam penyelenggaraan keamanan satu tempat. Standar ini mendorong semua pihak yang terlibat dalam manajemen pengamanan suatu tempat, termasuk penyedia tenaga pengamanan untuk menyesuaikan dengan standar kualifikasi tersebut, dimana ending pointnya tidak saja semakin meningkatnya layanan pengamanan yang terukur dan profesional, juga kesetaraan dalam kesetaraan kualifikasi kompetensi serta keahlian pada tiap personel Satpam yang dilibatkan.

Selanjutnya terkait dengan peran Polri sebagai Pembina penyelenggara fungsi-fungsi kepolisian, pada kesempatan ini perlu diketahui bahwa Polri telah menetapkan Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) Nomor 24 Tahun 2007 tentang **Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan / instansi / lembaga pemerintah**. Peraturan ini adalah salah satu wujud pelaksanaan tugas Polri, dalam pembinaan terhadap potensi pengamanan swakarsa, sekaligus revitalisasi terhadap pedoman-pedoman pengamanan swakarsa yang selama ini telah ada. Dengan diberlakukannya

Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan sistem manajemen pengamanan termasuk didalamnya Satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa akan mampu menjawab tantangan standar *global industrial security*.

Sejalan dengan harapan tersebut, terdapat beberapa penekanan yang perlu diketahui oleh komunitas sekuriti, para stakeholder dan seluruh anggota Satpam yaitu :

Dalam rangka menyamakan persepsi pada pelaksanaan pembinaan potensi pengamanan swakarsa, perlu kita pedomani Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007, tentang **Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan / instansi / lembaga pemerintah**.

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan, perhatikan selalu kualitas kerja yang ditampilkan, identifikasi setiap potensi ancaman dan gangguan yang ada ditempat kerja, serta eliminir potensi-potensi gangguan tersebut sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik dalam bentuk jiwa maupun harta benda.

Para personel Satpam hendaknya terus meningkatkan kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas masing-masing melalui penguasaan pengetahuan secara spesifik sesuai dengan tuntutan organisasi, sehingga layanan fungsi kepolisian terbatas, dapat dilaksanakan dengan lebih profesional.

Setiap personal Satuan Pengamanan diharapkan dapat berperilaku yang santun dan saling menghargai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan mengedepankan etika dan prinsip-prinsip penuntun Satuan Pengamanan.

Dalam menjalankan tugas pengamanan, para personel Satpam hendaknya meningkatkan dan mengembangkan sikap peka dan waspada terhadap setiap bentuk kejadian dilingkungan kerja, yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, koordinasikan berbagai permasalahan menyangkut aspek Kamtibmas dengan petugas Polri setempat.\*\*\*(Nats).

*Disarikan dari amanat Kapolri pada upacara HUT Satpam ke-37 tahun 2007 bertempat di Mabes Polri, Jakarta.*



# AS HIBAHKAN 15 KAPAL KE POLRI



Penandatanganan kerjasama Kapolri dan Dubes AS

Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui kerjasama *International Criminal Investigative Assistance Program (ICITAP)* lembaga dibawah Departemen Hukum AS kepada pemerintah Indonesia menghibahkan 15 Kapal Patroli perairan untuk memperkuat sarana operasi Polri dalam menindak kejahatan di perairan. Bentuk kejahatan diperairan itu, misalnya penyelundupan, Narkotika, perdagangan manusia dan penyelundupan barang termasuk barang berbahaya seperti bahan peledak. Hal itu dikatakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutanto di Batam. "Bantuan 15 kapal itu merupakan hibah. Tidak ada kompensasi apapun". Kata Sutanto disela-sela acara penyerahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) kapal dari Dubes AS untuk Indonesia Cammeron Hume untuk wilayah kepulauan Riau (Kepri). Hadir pada acara itu Kepala Polda Kepri Brigjen Pol Sutarman dan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah.

Total kapal yang dihibahkan Pemerintah AS kepada Polri 15 unit. Selain Kepulauan Riau sebanyak empat kapal,

daerah lain yang mendapat bantuan itu adalah Bitung sebanyak empat kapal, Bangka dua kapal dan Tarakan lima kapal. Kapal dengan panjang sembilan meter itu dilengkapi radar satelit. Kecepatan kapal bisa mencapai 46 knot dengan kapasitas bahan bakar 1.135,59 liter. Kapal itu juga mampu bermanuver berbalik arah 180 derajat. Selain menerima hibah kapal, Sutanto juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah AS melalui Kedubes AS. Penandatanganan dilakukan Kepala Polri dan Duta Besar AS untuk Indonesia. Perjanjian itu terkait dengan peningkatan kemampuan personel Polri, penanggulangan kejahatan dan dukungan prasarana. Sutanto menjelaskan bantuan hibah itu diberikan AS untuk membantu penanganan kejahatan diperairan. "Kejahatan melalui perairan cukup rawan" kata Kapolri.

Cammeron Hume mengatakan kerjasama dengan bantuan kepada Polri sudah lama dilakukan. Bantuan hibah merupakan upaya pemerintah AS memperkuat sarana operasi Polri dalam melindungi masyarakat. \*\*\* (berbagai sumber)



Anggota Satpolair dalam kesiapsiagaan



# Wujudkan Polisi Sipil Pratagonis, Demokratis, Transparan, Akuntabel dan Menjunjung Tinggi HAM

*Reformasi Multi dimensional sebagai dampak globalisasi yang sedang dan terus berjalan, membawa kita pada nuansa baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa fakta yang muncul, antara lain dengan berkembangnya nilai-nilai demokrasi disegala bidang, tuntutan terhadap*

*penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), pengangkatan hak asasi manusia, penekanan pentingnya otonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat lokal, hidupnya aktivis politik yang ditandai antara lain dengan sistem penyelenggaraan Pemilu secara langsung, lahirnya partai-partai baru dan sebagainya.*

Demikian antara lain amanat Kapolri pada pembukaan upacara Raker Bin SDM yang diselenggarakan di Rupattama Jakarta.

Lebih jauh Kapolri mengatakan menyikapi bergulirnya reformasi tersebut Polri sebagai institusi yang dipercaya memelihara keamanan dalam negeri, senantiasa berusaha menjaga eksistensinya melalui reformasi internal yang dilakukan secara gradual (bertahap) terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable*) utamanya pada aspek kultural. Reformasi ini sangat penting bagi Polri karena terkait dengan perubahan paradigma dari alat pengusaha yang bersifat antagonis, otoriter, tertutup, tidak akuntabel dan mengabaikan HAM, menjadi Polisi sipil yang bersifat



Upacara Pembukaan Rakernis Desumdaman



*pragonis, demokratis, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi HAM*, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Agar reformasi Polri dapat berjalan dengan baik, salah satu elemen pokok yang penting untuk diperhatikan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, karena SDM Polri merupakan obyek yang sekaligus juga merupakan subyek perubahan (*agent of change*). Oleh sebab itu untuk dapat menjadi *agent of change* yang optimal SDM Polri harus dikelola secara sistematis yang didukung dengan panduan dasar (*guiding principles*) nilai-nilai, visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan. Arah Pembangunan jangka panjang upaya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri antara lain melalui penyempurnaan seleksi dan rekrutmen serta perbaikan pendidikan dan pelatihan.

Berkaitan dengan seleksi dan rekrutmen yang telah diselenggarakan selaku Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DeSDM Kapolri dan seluruh Panitia penerimaan Akpol TA 2007 beberapa waktu lalu. Panitia telah mampu melaksanakan proses penerimaan secara bersih, transparan dan akuntabel, publik telah memberikan penghargaan Museum Rekor Indonesia sebagai pemrakarsa penyelenggaraan seleksi personel Polri dengan penilaian paling bersih, transparan dan akuntabel diantara instansi lainnya.

Kedepan prinsip bersih, transparan dan akuntabel diharapkan dapat menjadi *brand image* Polri, artinya dalam melaksanakan tugasnya seluruh anggota Polri harus menunjukkan prinsip bersih, transparan dan akuntabel. Untuk lebih menanamkan hakekat nilai-nilai HAM dalam jiwa setiap insan Polri, maka selain bersih, transparan dan akuntabel juga agar lebih bersifat humanis dalam seluruh proses penerimaan anggota Polri. Walaupun prinsip bersih, transparan dan akuntabel tersebut sudah mulai dilaksanakan secara konsisten ditingkat Pusat namun implementasinya

ditingkat Polda masih belum dirasakan. Oleh karena itu para Kapolda dan jajarannya diharapkan benar-benar serius melaksanakan hal tersebut agar *brand image* tersebut dapat segera terwujud.

Untuk mewujudkan apa yang kita semua harapkan dalam bidang SDM ini, manfaatkan Raker SDM Polri tersebut dapat mengidentifikasikan berbagai permasalahan, kendala serta temuan-temuan persoalan penting, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penyediaan SDM Polri serta merumuskan solusinya baik pada tataran strategi dan kebijakan maupun pada tataran implementasinya. Kekurang tepatan atau bahkan kesalahan dalam perumusan strategi dan kebijakan dibidang SDM, akan berimplikasi terhadap implementasi penyelenggaraan dilapangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap pembentukan sikap dan perilaku anggota Polri. Oleh sebab itu guna mewujudkan postur SDM Polri yang profesional, modern dan bermoral serta dipercaya oleh masyarakat, disemua tingkat organisasi dan fungsi sampai dengan unit organisasi terkecil yang terdekat dengan sentra kegiatan pelayanan masyarakat, diperlukan adanya sinkronasi dan konsistensi, penyelenggaraan manajemen SDM Polri dari tataran strategi kebijakan sampai dengan implementasinya. Artinya setiap penyelenggaraan *werving/rekrutmen* calon anggota Polri mulai dari Pansus, Sub Pansus, Panda, Sub Panda sampai ketinggian Panbanrim harus sinkron dan konsisten dengan proses penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

Sebelum mengakiri amanatnya Kapolri menyampaikan beberapa penekanan sabagai berikut :

1. Lakukan terus penyelenggaraan *werving/rekrutmen* anggota Polri, baik Perwira (melalui Akpol dan PPSS) serta Bintara secara bersih, transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal, Ingat

bahwa hal ini, telah menjadi komitmen kita bersama, sebagai wujud implementasi reformasi Polri dibidang Sumber Daya Manusia. Selain itu, saya juga memerintahkan kepada para Kapolda dan seluruh jajarannya agar benar-benar melaksanakan proses *werving/rekrutmen* ini, dengan konsisten kedepan. Tidak ada lagi Kapolda atau pejabat Panda/Sub Panda/Panbanrim yang menolak kehadiran pengawas eksternal atau berupaya tidak memberdayakan peran pengawas eksternal pada setiap tahapan pelaksanaan *werving* maupun seleksi.

2. Selaku Kapolri saya meminta kepada para Kapolda dalam proses *werving/rekrutmen* mampu mengakomodir dan menjaring putra daerah dan anak-anak golongan masyarakat yang tidak mampu dibidang sosial ekonominya, tetapi memiliki potensi untuk menjadi anggota Polri guna memenuhi pemerataan dan keadilan serta prinsip "*local boy for the local job*". Selain itu sebagai wujud kepedulian Polri, mulai tahun 2008 nanti akan dilaksanakan program *talent scouting* calon mahasiswa beasiswa Polri. Bagi lulusan SMU yang memiliki potensi, bakat dan minat yang tinggi untuk menjadi Perwira Polri, namun karena keterbatasan kondisi sosial ekonominya tidak dapat melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi sehingga tidak berkesempatan menjadi Perwira Polri.

3. Jadikan temuan-temuan dari pengawas internal maupun pengawas eksternal, sebagai feed back dan masukan yang positif guna memperbaiki dan menyempurnakan sistem serta pelaksanaan *werving/rekrutmen* dimasa yang akan datang.\*\*\*

● *Disarikan dari amant Kapolri pada upacara pembukaan Raker Bin SDM yang diselenggarakan di Rupattama Jakarta.*



# Mari bersama membangun Profesionalitas Pemuda yang memiliki Etos Kerja, Daya Saing, dan Kemandirian



Iwasum Polri sebagai Irup peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2007

*Hari Sumpah Pemuda yang setiap tahun diperingati merupakan momentum bersejarah dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mata rantai perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda yang lahir dari Kongres Pemuda ke II tahun 1928, merupakan salah satu bagian dari proses konsolidasi kebangsaan, menuju cita-cita Indonesia merdeka,*

Demikian antara lain amanat Kapolri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 79 yang diselenggarakan di lapangan Upacara Mabes Polri Jakarta beberapa waktu lalu. Selanjutnya Kapolri mengatakan Sumpah Pemuda telah berhasil menyatukan gerak langkah dan tekad seluruh bangsa, untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, yang telah menjajah bangsa Indonesia, selama lebih dari tiga setengah

abad, dengan demikian makna yang paling penting dari Hari Sumpah Pemuda pada masa perjuangan adalah menggelorakan semangat dan kesadaran seluruh Bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan, kesatuan dan kebulatan tekad dalam rangka bersama-sama melawan penjajah yang mengancam kemerdekaan Bangsa Indonesia, sehingga penjajah yang secara fisik, kekuatan dan kemampuannya jauh lebih besar dari pada kemampuan bangsa Indonesia pada saat itu, dapat diusir dari Bumi Nusantara.

Pada masa kini sekalipun kemerdekaan sudah diraih dan Bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan nasional, namun semangat Sumpah Pemuda harus terus digelorakan, karena persatuan dan kesatuan yang menjiwai semangat Sumpah Pemuda, merupakan modal dasar dan pijakan yang kuat, untuk membangun masa depan bangsa yang aman, adil, makmur

dan sejahtera. Kesadaran tentang hal ini perlu kita tumbuhkan mengingat meraih apa yang kita cita-citakan tersebut tidaklah mudah karena kita dihadapkan dengan tantangan bangsa kita pada masa kini dan masa mendatang yang akan semakin berat dan kompleks.

Pimpinan Polri menilai sangat tepat bila pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-79 tahun 2007 ini, diambil tema tentang *"Meningkatkan solidaritas dan profesionalitas Pemuda Menuju Bangsa yang Sejahtera dan Bermartabat"*. Tema ini tentunya tidak berlaku khusus hanya kepada lingkungan para Pemuda, karena untuk mewujudkan solidaritas, integritas dan profesionalitas Pemuda tidak mungkin dapat dicapai hanya oleh lingkungan Pemuda saja. Untuk itu, keterlibatan dari segenap komponen masyarakat bangsa dan Negara lainnya termasuk dalam hal ini Polri, dalam kaitan dengan tugasnya sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sangat dituntut dan diperlukan.

Dalam era reformasi, yang iklim kehidupannya lebih demokratis, sebagai aparat Negara, kita lebih sering dihadapkan kepada suasana yang lebih menuntut kebebasan setiap warganya dalam bersikap dan berbicara dan berbuat. Disatu sisi kondisi seperti ini memang cukup positif bagi tatanan kehidupan demokratis.

Tetapi disisi lain kondisi tersebut juga dapat mendatangkan dampak yang negatif, bila tidak diimbangi dengan kesadaran hukum setiap warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik yang bersifat horizontal maupun vertikal, dapat saja terjadi dan hal ini memerlukan perhatian serius dari kita semua. Posisi ini tentunya membutuhkan



kemampuan anggota Polri untuk bertindak secara profesional, proporsional, arif, transparan, indiskriminatif dan senantiasa menghormati Hak Asasi Manusia. Tujuan dari peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mencakup dua hal pokok yakni Pertama; upaya peningkatan kesadaran kolektif kesadaran bangsa untuk memelihara solidaritas, integritas dan mengembangkan profesionalisme Pemuda. Kedua; meningkatkan kapasitas serta kompetensi Pemuda menuju bangsa yang berdaya saing ditengah interaksi kehidupan global.

Guna lebih memahami tujuan tersebut perlu dirinci sasaran-sasaran pembinaan Pemuda yang lebih ditegaskan melalui penyelenggaraan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai berikut :

1. Memperkokoh jiwa kebangsaan Pemuda untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan partisipasi Pemuda, dalam pembangunan nasional, menghadapi era persaingan global.
3. Memperkuat kesadaran berdemokrasi, melalui pendidikan politik, sebagai refleksi warga Negara yang berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Menumbuhkan semangat kepeloporan dan jiwa kepemimpinan Pemuda, untuk mempersiapkan pemimpin bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia.
5. Mendorong sikap dan perilaku kesukarelawan Pemuda, terutama dalam menanggulangi masalah kemiskinan, peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencegahan HIV/AIDS, masalah Kamtibmas serta masalah-masalah sosial mendesak lainnya.
6. Meningkatkan profesionalitas Pemuda yang memiliki etos kerja, daya saing dan kemandirian, untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.
7. Memperkokoh integritas kepribadian Pemuda yang berjiwa diri, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kelestarian nilai-nilai luhur bangsa, dalam rangka mempersiapkan pemimpin masa depan.



Peserta upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2007

8. Menumbuhkembangkan semangat solidaritas Pemuda, dengan mengembangkan rasa empati dan kepedulian, dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.
9. Menumbuhkembangkan sikap dan budaya kewirausahaan Pemuda, untuk memberikan kesempatan berusaha dan memperluas lapangan kerja dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Mengingat pentingnya peran Pemuda dalam pembangunan maka kepada seluruh satuan dan anggota Polri umumnya, dan khususnya kepada fungsi Kepolisian yang mengemban peran pembinaan Pemuda, diharapkan dapat menyelaraskan implementasinya dilapangan agar dapat mencapai hasil pembinaan yang optimal, maka pelaksanaannya harus disertai upaya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Dengan memperhatikan pentingnya peran Pemuda, baik dalam rangka pembangunan nasional atau sebagai kader penerus bangsa, melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda kita gelorakan kembali semangat yang terpancar dari para pejuang Pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan, yang telah berhasil meraih kemerdekaan berkat semangatnya yang pantang menyerah dan kerelaan mengorbankan jiwa serta raga tanpa

pamrih, walaupun para pejuang yang telah gugur tersebut, tidak dapat ikut menikmati kemerdekaan ataupun kesejahteraan yang telah dicapai saat ini.

Sebelum menutup amanatnya Kapolri dihadapan para anggota dan PNS Polri agar memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pejuang pendahulu dan sebagai salah satu bentuk upaya untuk meneruskan cita-cita perjuangan tersebut, seyogyanya Hari Sumpah Pemuda dijadikan sebagai berikut:

1. Sebagai sumber inspirasi, untuk meningkatkan perhatian kita terhadap pentingnya pembangunan kepemudaan yang merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional.
2. Jadikan sebagai penggugah semangat meningkatkan integritas dan solidaritas antar sesama warga Negara, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi kelancaran pembangunan nasional.
3. Jadikan landasan motivasi dalam menumbuhkembangkan semangat dan tekad Pemuda Indonesia, sebagai lokomotif gerakan kewirausahaan nasional, guna mencapai keunggulan kompetitif yang memiliki ketangguhan ditengah interaksi kehidupan perekonomian global. \*\*\* (nats)

*Disarikan dari Amanat Kapolri pada Upacara Hari Sumpah Pemuda bertempat dilapangan Upacara Mabes Polri – Jakarta.*



# Tingkatkan Profesionalisme, Hindari Pelanggaran sekecil apapun, Berikan Pelayanan kepada Masyarakat secara Cepat, Tepat, dan Transparan

"Melihat kembali sejarah, pada peristiwa pembentukan Kepolisian Perairan dan Udara Polri, kita akan memahami bahwa konsep awal pembentukan Kepolisian Perairan dan Udara dilatarbelakangi oleh perkembangan situasi dan kondisi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Negara Kepulauan"

Demikian antara lain amanat Kapolri ketika upacara HUT Polairud ke 7 di Jakarta.

Lebih jauh Kapolri mengatakan Saat itu dirasakan bahwa kompleksitas permasalahan menyangkut tugas Kepolisian semakin meningkat, sehingga diperlukan Polisi yang bertugas khusus mengamankan perairan Indonesia, memberantas penyelundupan serta mengawasi lintas batas wilayah, selain itu, Kepolisian dihadapkan pada keperluan alat angkut dan perhubungan laut, guna pengangkutan barang dinas, pemindahan pasukan, maupun pengangkutan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada situasi tertentu. Berdasarkan latar belakang inilah kemudian dibentuk Polisi Perairan, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor : 510/PM/1950 tanggal 5 Desember 1950. Pada perkembangan selanjutnya diakhir tahun 1955, dibentuk Seksi Udara, sebagai bagian dari Polisi Perairan, guna mendukung pelaksanaan tugas satuan tersebut hingga pada perkembangan terakhir ini Seksi Udara dipisahkan menjadi Kepolisian Udara Polri sebagai satuan yang berdiri sendiri. Kemudian dalam sejarah perkembangan Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polri

tersebut, kita juga dapat melihat bahwa dalam perjalanannya yang cukup panjang kedua Satuan ini telah terbukti mampu mendharmabaktikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, dengan segala keterbatasan yang dihadapi baik yang bersifat internal maupun eksternal Polairud telah berhasil meningkatkan kinerjanya dengan baik.

Beberapa keberhasilan yang patut kita catat, antara lain penindakan terhadap perompakan (Sea Piracy) yang mencemaskan pengguna transportasi laut, terutama jalur laut yang banyak digunakan oleh Kapal Berbendera

asing. Berkaitan hal ini selaku pimpinan mengatakan bahwa pada lingkup internasional terutama dikalangan Polisi Perairan Asia dan kawasan lain, jajaran Kepolisian telah cukup dikenal dalam memberantas *Transnational Crime* khususnya perompakan di laut (Sea Piracy).

Selain kemitraan yang dijalin dengan masyarakat kita sendiri, kerjasama dengan masyarakat internasional, juga perlu terus dikembangkan. Kita bersyukur kerjasama tersebut telah dapat menarik kepercayaan masyarakat internasional, antara lain dari Pemerintah Jepang, dimana pada tanggal 30 November 2007 lalu, Polri menerima 3 Kapal Hibah pemerintah Jepang senilai +/- 150 milyar lebih. Bantuan ini merupakan bagian dari rangkain kerjasama yang telah terjalin dengan baik, antara pemerintah Jepang via *Coast Guard* Jepang dengan Polri via Polairud, dimana pemerintah Jepang mengamati bahwa Polairud berperan penting menjaga keamanan, penegakan hukum dan memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat, bagi kepentingan domestik maupun internasional khususnya berkaitan



Peringatan HUT Polairud ke 57

dengan transportasi yang menggunakan wilayah perairan Indonesia.

Melihat berbagai keberhasilan yang dicapai oleh Polairud Polri perlu ditekankan kepada jajaran Polairud Polri untuk tidak cepat berpuas diri, karena itu perlu diperhatikan bahwa gangguan Kamtibmas yang perkembangannya semakin cepat dan kompleks tidak saja akan eksis didaratan, melainkan juga akan eksis diwilayah perairan dan penerbangan.

Seperti diketahui bahwa isu keamanan dan ketertiban diwilayah perairan dan penerbangan, telah menjadi isu global khususnya menyangkut

kejahatan-kejahatan tertentu, yang berkadar ancaman-kejahatan tinggi, berimplikasi kontijensi, perusakan lingkungan hidup, pencurian kayu, kejahatan transnasional, dan kejahatan yang dapat berdampak luas.

Semua isu keamanan dan ketertiban tersebut berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, hubungan internasional, tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang mempengaruhi citra Indonesia dimata dunia, maupun hal-hal strategis lainnya.

Sebelum mengakhiri amanatnya, pada kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan beberapa penekanan-penekanan sebagai berikut :

1. Tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dijadikan landasan, dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian semua tugas yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara.
2. Jaga keutuhan dan kekompakan serta jalin hubungan yang baik dengan komponen masyarakat, Bangsa dan Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Kepolisian diwilayah perairan dan penerbangan.
3. Pelihara dan kembangkan terus ketrampilan serta kemampuan yang dimiliki, guna menunjang pelaksanaan tugas. Ikuti terus perkembangan Iptek, khususnya yang terkait erat dengan hal teknis perkapalan dan penerbangan.
4. Tingkatkan profesionalisme dan hindari pelanggaran sekecil apapun, serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya dan berikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan transparan.
5. Kuasa karakteristik kerawanan disekitar lingkungan tugas, khususnya pada titik-titik yang telah ditetapkan. Cari upaya terobosan untuk mengatasi berbagi potensi gangguan Kamtibmas yang ada.
6. Lakukan tindakan tegas terhadap setiap kejahatan yang merugikan masyarakat dan dapat merusak citra Indonesia dimata dunia, seperti perompakan, *illegal logging* berkaitan dengan isu *climate change*, penyelundupan senjata api, bahan peledak, terutama terkait isu terorisme dan lain-lainnya.\*\*\* (nats).

Disarikan dan Amanat Kapolri pada upacara HUT Polairud ke-57 bertempat di Mako Polairud Jakarta.